

FRAUD PENTAGON DALAM PROSES PENGAJUAN DANA HINGGA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PADA ORMAWA X

Avisenna Harkat¹, Kamilia Dika Purnama Sari²

^{1,2}Politeknik Negeri Jember

*Korespondensi: avisenna@polije.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan kualitatif melalui pendekatan studi kasus serta menggambarkan praktik kecurangan yang dilakukan dan menjelaskan faktor penyebab kecurangan tersebut terjadi pada Ormawa X di Peguruan Tinggi Y. Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian wawancara dan dokumentasi yang dilakukan kepada keempat informan yang merupakan anggota Ormawa X periode 2021 . Penelitian ini memberikan hasil bahwa praktik kecurangan terhadap pengajuan dana anggaran hingga pelaporan pertanggungjawaban yang dibuat ormawa X telah menjadi budaya yang diwarisi oleh senior-senior terdahulu dan akan terus berlanjut pada generasi berikutnya. Kecurangan tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti karena sikap arogansi, kesempatan, tekanan, kemampuan, dan rasa rasionalisme. Jenis kecurangan yang paling sering dilakukan adalah meliputi pemalsuan bukti transaksi, pemalsuan barang kegiatan serta permainan harga barang naik/turun pada anggaran.

Kata kunci: Kecurangan Mahasiswa & Kecurangan Laporan Keuangan

Abstract

The purpose of this research is to generate qualitative insights through a case study approach and to depict the fraudulent practices carried out, as well as to explain the factors causing such fraud within Student Organization X at University Y. This study employs research instruments such as interviews and documentation, conducted with the four informants who are members of Student Organization X period 2021. The research findings indicate that fraudulent practices, from budget proposal to accountability reporting, have become a culture inherited from previous seniors and are likely to persist in the upcoming generations. The fraud occurs due to various factors such as arrogance, opportunity, pressure, ability, and rationalism. The most frequently committed types of fraud include falsification of transaction evidence, manipulation of activity-related items, and manipulation of price fluctuations in the budget.

Keywords: Student Fraud & Financial Report Fraud

PENDAHULUAN

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun oleh suatu organisasi, perusahaan, atau pemerintah untuk periode tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran dan penerimaan di masa yang akan datang. Anggaran digunakan sebagai alat untuk mengelola sumber daya keuangan dan untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam anggaran rentan terjadi kecurangan karena proses penyusunannya melibatkan manipulasi atau penggunaan anggaran secara tidak sah. Kecurangan dalam anggaran dapat terjadi ketika individu atau kelompok dalam organisasi menggunakan sumber daya keuangan untuk kepentingan pribadi atau organisasi secara tidak sah (Cahyaningtyas & Achsin, 2018).

Kecurangan (fraud) adalah suatu penyajian palsu laporan keuangan yang secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Fraud merupakan ancaman yang akan selalu muncul di dalam organisasi besar maupun organisasi kecil (Gumelar et al., 2020). Terjadinya fraud dipengaruhi oleh beberapa faktor berdasarkan fraud triangle yaitu terdiri dari tekanan atau motivasi yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, peluang untuk melakukan tindakan kecurangan, dan sikap merasionalisasi kecurangan (Free, 2015). Selanjutnya teori ini dikembangkan oleh Marks dengan menambahkan dua faktor yang menyebabkan fraud terjadi yaitu faktor kompetensi atau kemampuan seseorang merekayasa laporan keuangan dan arogansi yang kemudian disebut sebagai fraud pentagon theory (Marks, 2014).

Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) yang merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan mengklasifikasikan fraud dalam tiga tingkatan yang disebut Fraud Tree, yaitu assets missapropriation financial (penyalahgunaan aset), statement fraud (kecurangan laporan keuangan) dan corruption (korupsi). Dari ketiga jenis tersebut, kecurangan berupa korupsi merupakan masalah global yang terjadi di berbagai negara maju dan berkembang yang mengakibatkan kerugian pada negara. Misalnya kasus korupsi di Nigeria, yaitu mantan Wakil Rektor Universitas Federal, Gusau, Profesor Magaji Garba telah ditahan oleh Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) untuk dugaan korupsi senilai Dua Ratus Enam Puluh Juta Naira (N260,000,000) (Ogunode dan Ohunene, 2021).

Di Indonesia sendiri juga banyak kasus kecurangan terjadi diberbagai sektor baik itu pemerintah, perusahaan bahkan di sektor pendidikan. Berdasarkan survei fraud di Indonesia yang dilakukan oleh ACFE ditahun 2019 menyebutkan bahwa fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi dengan presentase 64,4%, penyalahgunaan aset dengan presentase 28,9% dan laporan keuangan sebesar 6,7% (ACFE, 2019).

Perguruan Tinggi Negeri merupakan organisasi sektor publik yang tak lepas dari kegiatan berupa pengelolaan keuangan. Perguruan tinggi Negeri mendapatkan dana dari pemerintah yang kemudian harus dikelola dengan baik untuk kemudian dipertanggungjawabkan. Sehingga perguruan tinggi pun bisa dikatakan sebagai lembaga yang tidak steril dari kecurangan-kecurangan (*frauds*). Korupsi di dunia akademis adalah salah satu faktor paling menonjol yang berkontribusi terhadap penurunan standar pendidikan universitas (Kingston, 2011). Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia yaitu kasus dugaan korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Lampung, Prof. Dr. Karomani terkait proses seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mematok tarif Rp. 100.000.000 hingga Rp. 350.000.000 per mahasiswa melalui jalur mandiri (kompas.com, 21/09/2022). Alasan melakukan sebuah tindakan korupsi ada banyak motif seperti yang disebutkan oleh (Tuanakotta, 2007) yaitu karena “corruption by need, by greed and by opportunity”, korupsi karena kebutuhan, karena sifat serakah, dan karena adanya peluang untuk melakukan.

Di dalam perguruan tinggi terdapat organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Organisasi Mahasiswa (Ormawa) merupakan sebuah wadah yang dibentuk oleh perguruan tinggi demi mewujudkan kreativitas dan mengembangkan soft-skill mahasiswa (Sunaryo dan Utami 2021). Dalam menjalankan program kegiatannya, ormawa mengajukan dana kegiatan kepada Lembaga perguruan tinggi dengan membuat anggaran kegiatan kemudian dana tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan output berupa Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan. Pengurus ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan dana yang didapat disetiap kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan penelitian terdahulu banyak kasus penyimpangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan suatu ormawa di perguruan tinggi seperti asset misappropriation dan expense reim-burserment schemes yaitu dengan meninggikan biaya dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan (Puspita et al., 2015); (Hidayati, 2018); dan (Cahyaningtyas dan Achsin, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena terkait subjek yang diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan aspek lainnya secara holistik dengan cara deskripsi berupa kata - kata dengan memanfaatkan metode alamiah yang ada (Moleong, 2018). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Studi kasus, adalah bagian dari metode kualitatif yang mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. . Lokasi penelitian ini adalah salah satu Organisasi Mahasiswa (Ormawa) X yang berada di Perguruan Tinggi Y. Dan sumber data yang dibutuhkan adalah menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder seperti dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Marks, (2014) Fraud Pentagon Theory adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan atau penipuan dalam sebuah organisasi. Marks, (2014) menyebutkan lima faktor yang menyebabkan fraud yaitu pressure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (rasionalisasi), competence (kompetensi), and arrogance (arogansi). Peneliti mencoba menggambarkan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu ormawa dan menganalisis faktor penyebab dari praktik kecurangan yang dilakukan dalam pengelolaan anggaran kegiatan organisasi mahasiswa dengan narasumber dalam penelitian ini adalah anggota Ormawa X periode 2021 yaitu Ketua, Wakil Ketua, Bendahara dan Sekretaris Ormawa X di Perguruan Tinggi Y.

1. Arogansi

Marks, (2014) menjelaskan arogansi adalah sifat yang mencerminkan perasaan sombong dan kurangnya kesadaran, berasal dari keserakahan dan keyakinan bahwa aturan internal ataupun sanksi tidak berlaku untuk mereka

secara personal. Dalam penelitian ini, arogansi muncul pada diri mahasiswa yang berasal dari keserakahan dalam memaksimalkan dana yang didapat dari Lembaga.

“...semisal 1 divisi 2 juta Nah setiap divisi itu biasanya melakukan kecurangan kayak dana itu dinaikkan, jadi semisal 3 juta, kira-kira divisi jadi 2,5 juta, jadi anggaran yang seharusnya 2 juta jadi nambah 500 ribu, kayak gitu..” (Ketua Ormawa X)

Pernyataan dari Ketua Ormawa X mengungkapkan bahwa arogansi muncul pada mahasiswa yang didorong oleh keserakahan untuk memaksimalkan dana yang diterima dari lembaga. Dalam konteks ini, para mahasiswa terlibat dalam praktik kecurangan dengan menaikkan jumlah anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk divisi tertentu. Informan secara sengaja meningkatkan angka pengeluaran yang dianggap sebagai dana yang tersedia, sehingga memperoleh keuntungan pribadi yang lebih besar. Sebagai peneliti, analisis terhadap pernyataan ini mengindikasikan adanya praktik kecurangan yang terjadi dalam lembaga tersebut, yang didorong oleh motivasi finansial yang egois.

Peneliti mencoba mengeksplorasi dampak kecurangan anggaran terhadap keuntungan yang diperoleh oleh organisasi, sebagaimana dalam pernyataan Wakil Ketua berikut ini,

“Keuntungannya ya berupa uang itu tadi dek, dari dana yang kita anggarkan pasti ada lebihnya dek soalnya kan dana yang kita cantumkan di proposal misal 5 juta kadang yang cair itu 3 juta jadi kita ambil keuntungan disitu meskipun kurang uangnya.” (Wakil Ketua Ormawa X)

Pernyataan dari Wakil Ketua Ormawa X mengungkapkan bahwa informan sengaja melakukan mark-up anggaran yang diajukan dalam proposal agar dapat memperoleh lebih banyak dana. Namun, saat dana yang dicairkan lebih rendah dari anggaran yang diajukan, mereka tetap mengambil keuntungan dari perbedaan tersebut. Praktik ini melibatkan manipulasi anggaran yang dapat dikategorikan sebagai bentuk *fraud*.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dalam konteks teori *fraud pentagon*, arogansi bisa dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi "perasaan kemampuan" para informan. Para informan merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan sanksi karena mereka merasa bisa menghindari sanksi tersebut, dan merasa bahwa aturan tidak berlaku bagi mereka. Dalam pernyataan Ketua Ormawa X, arogansi memungkinkan para mahasiswa untuk merasa mereka dapat memanipulasi dana organisasi sesuai keinginan mereka tanpa takut akan konsekuensi. Mereka merasa dapat dengan leluasa meningkatkan anggaran dan mengalokasikan dana lebih banyak untuk keuntungan pribadi tanpa adanya pertanggungjawaban. Dengan demikian, sikap arogansi yang dimiliki ormawa telah mendorong terjadinya kecurangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan dan pelaporan dana kegiatan, karena anggota ormawa yang terlalu percaya diri dan cenderung mengabaikan aturan dan prosedur yang berlaku serta memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Temuan ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sunaryo, 2020) yang menyatakan bahwa keserakahan merupakan bagian dari tekanan keuangan pribadi yang berkaitan dengan motivasi mahasiswa dalam melakukan kecurangan di lingkup ormawa. Keserakahan ini menyebabkan pengurus Ormawa melakukan fraud dengan melakukan mark-up anggaran. Data penelitian ini menunjukkan keserakahan pengurus Ormawa berperan dalam timbulnya tindakan *fraud* pada Ormawa.

2. Kompetensi

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang untuk mengesampingkan atau mengabaikan pengendalian internal, mengembangkan suatu strategi penyembunyian yang canggih, dan mengendalikan situasi sosial untuk keuntungannya dengan menjualnya kepada orang lain (Marks, 2014). Kemampuan mahasiswa melakukan kecurangan dalam lingkup ormawa terlihat dari segi kreativitas dan keahlian mahasiswa dalam melaksanakan praktik kecurangan pengelolaan anggaran kegiatan, sehingga muncul keuntungan dari tindakan tidak jujur, yang tercermin dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Ormawa X dan Bendahara sebagai berikut,

“Nah, kalau di UKM X ini kadang kalau ada bukti transaksi, ya kita pakai bukti transaksi tersebut. Nah, apabila nggak ada, kita dari BPH itu biasanya sudah menyiapkan nota. Nota sama stempel-stempel untuk kebutuhan LPJ-an seperti itu. Jadi misal fotokopi, kita nggak ada notan dari fotokopian. Jadi kita mengarang sendiri harganya berapa sesuai dengan proposal, nota kita tulis di nota, terus stempel kita ada..” (Ketua Ormawa X)

Dalam penelitian ini, Ketua mengungkapkan kemampuan internal mereka untuk mengatasi pengendalian internal dan merancang strategi penyembunyian dengan menggunakan dokumen palsu, seperti nota palsu dengan stempel-stempel yang sudah disiapkan. Informan secara sadar menciptakan dokumen palsu untuk menutupi pelanggaran mereka terhadap prosedur dan aturan yang ada, menunjukkan kemampuan mereka dalam mengatasi hambatan-hambatan internal. Selain itu, Ketua juga menyinggung bahwa mereka berhasil mengelola situasi sosial dengan melibatkan anggota lain dari Badan Pengurus Harian (BPH) dalam praktik penipuan tersebut. Kemudian, pernyataan Ketua didukung oleh narasumber lain yaitu Bendahara Ormawa X sebagai berikut,

“terkait melakukan kecurangan memang tidak sebarangan seperti membuat anggaran sendiri harus tau patokan harga yang kita taruh juga kan kita harus survei ke beberapa lokasi terus juga kayak nota eee itu toko kan juga beda dan butuh stempel juga jadi harus memanipulasi stempel juga. Kalau terkait nota dan stempel yang dibuat itu kalau benar-bener dari toko itu tidak menyediakan jadi dari kita yang buat bukti transaksi sendiri.” (Bendahara Ormawa X)

Dalam penelitiannya (Salsabil, 2019) mengatakan bahwa manipulasi yang dilakukan oleh ormawa tidak sama dengan manipulasi laporan keuangan pada perusahaan biasanya. Manipulasi dilakukan pada proposal kegiatan, anggaran dan juga laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh ormawa. Dalam melakukan manipulasi tersebut adakalanya organisasi memakai dan membuat

nota kosong dan stempel sendiri untuk memenuhi persyaratan administrasi dalam laporan pertanggungjawaban. Pernyataan dari Ketua Ormawa dan Bendahara mengungkapkan bahwa praktik kecurangan yang terjadi melibatkan manipulasi bukti transaksi dan pembuatan dokumen palsu untuk keperluan pelaporan. Dokumen palsu ini dibuat untuk menutupi kekurangan bukti transaksi yang sebenarnya, dan menciptakan kesan bahwa pengeluaran telah dibuat sesuai dengan proposal anggaran. Tindakan tersebut menggambarkan bagaimana faktor kompetensi memainkan peran kunci dalam terjadinya kecurangan.

3. Kesempatan

Faktor ketiga yang menyebabkan kecurangan laporan keuangan adalah peluang. Marks, (2014) menjelaskan bahwa peluang dalam tindakan kecurangan diakibatkan karena lemahnya pengendalian. Organisasi dengan pengendalian internal yang lemah akan memiliki banyak celah yang dapat menghadirkan peluang bagi manajemen untuk memanipulasi transaksi atau akun. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati peluang yang terbuka bagi mahasiswa yang terlibat dalam kecurangan pengelolaan anggaran kegiatan ormawa dan memanfaatkan situasi tersebut untuk menjalankan tindakannya.

“Untuk yang saya lakukan selama ini belum ada sanksi pasti ya karena gak ketahuan juga.” (Sekretaris Ormawa X)

Wakil Ketua menerka bahwa jika kecurangan tersebut diketahui, kemungkinan yang terjadi adalah pembekuan dana ormawa selama 1 tahun.

“Pasti ada sih dek. Kalo mengenai sanksinya itu apa aku gak tau pastinya ya dek soalnya aku belum pernah dapat sanksi gitu, ee mungkin sih pembekuan dana UKM selama 1 tahun mungkin kayak gitu sih mungkin.” (Wakil Ketua Ormawa X)

Dari pengakuan kedua informan menunjukkan bahwa dalam konteks organisasi mereka, tidak ada sanksi yang pasti atau tindak lanjut yang jelas dari lembaga terhadap anggota ormawa yang melakukan kecurangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Pernyataan Sekretaris Ormawa menunjukkan bahwa kecurangan seringkali tidak terdeteksi, dan bahkan jika terjadi, tidak ada sanksi yang diterapkan karena kurangnya pengawasan atau penegakan aturan yang ketat. Sedangkan pernyataan Wakil Ketua Ormawa menunjukkan bahwa meskipun ada spekulasi tentang sanksi, tidak ada kepastian mengenai jenis atau tingkat sanksi yang akan diterapkan.

Pada saat wawancara, Sekretaris Ormawa X menjelaskan bahwa mereka memiliki strategi untuk mengatasi pemeriksaan detail terhadap anggaran kegiatan. Mereka mengaku bahwa jika terbukti melakukan kecurangan dalam pembelian barang yang tidak sesuai dengan harga yang dianggarkan, mereka akan membuat nota dan stempel palsu untuk menutupi jejaknya. Sejalan dengan penelitian (Puspitasari, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan memeriksa LPJ atas dasar kepercayaan memberikan kesempatan bagi pengurus ormawa melakukan kecurangan. Pihak lembaga pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, seperti

menetapkan aturan tentang barang yang boleh dianggarkan dan meminta bukti untuk setiap transaksi. Meskipun demikian, pernyataan dari Sekretaris Ormawa menunjukkan bahwa meskipun lembaga telah menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dana, anggota ormawa masih menggunakan kepercayaan dan kebijakan lembaga tersebut untuk melakukan kecurangan.

Dalam konteks teori fraud pentagon yang dikembangkan oleh Marks (2014), situasi ini dapat dikaitkan dengan faktor kesempatan. Kurangnya penegakan hukum atau sanksi yang konsisten terhadap pelaku kecurangan menciptakan lingkungan di mana para pelaku merasa memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan tanpa takut akan konsekuensi yang signifikan. Kondisi ini menciptakan celah atau kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kecurangan tanpa terdeteksi atau dihukum, karena informan merasa bahwa risiko terlibat dalam kecurangan relatif rendah.

4. Tekanan

Dalam publikasi white paper berjudul "*Playing Offense in a High-Risk Environment*," Marks menyatakan bahwa faktor keempat dalam *Fraud Pentagon* adalah tekanan. Marks mendefinisikan tekanan sebagai motivasi yang mendorong individu untuk melakukan dan menyembunyikan tindakan kecurangan yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, para informan menyatakan bahwa kecurangan yang mereka lakukan disebabkan karena adanya tekanan, baik dari kondisi keuangan, ataupun lingkungan organisasi.

"Menurut saya sendiri sih memang kalo tidak melakukan kecurangan tersebut itu tidak dapat memaksimalkan anggaran karena memang melalui pengalaman yang sebelumnya ketika kita menganggarkan ke kemahasiswaan sendiri yang dikeluarkan untuk anggaran tersebut jauh dibawah yang dianggarkan." (Bendahara Ormawa X)

Kemudian detail terkait kurangnya dana yang cair dijelaskan oleh Wakil Ketua sebagai berikut,

"Eee jadi gini ya dek ya, ee apa namanya kek semisal kita tuh butuh dana 2 juta kadang yang turun dari lembaga itu gak nyampek 2 juta, cuma 900.000 atau 1,5 juta kayak gitu. Karena kan ada beberapa kayak anggaran-anggaran kita masukkan tuh e apa namanya bahan-bahan yang kita masukkan itu gak di ini apa gak boleh di itu loh dimasukkan di dalam proposalnya kayak gitu, jadi ya mau gak mau kita harus ngakali kayak gitu." (Wakil Ketua Ormawa X)

Pernyataan dari Bendahara Ormawa X dan detail yang diberikan oleh Wakil Ketua Ormawa X menyoroti tekanan yang dihadapi oleh ormawa terkait kekurangan dana yang cair dari lembaga. Bendahara mengungkapkan bahwa tanpa melakukan kecurangan, sulit untuk memaksimalkan penggunaan anggaran karena dana yang cair jauh di bawah yang telah dianggarkan. Kemudian, Wakil Ketua memberikan gambaran lebih rinci tentang kurangnya dana yang cair dari lembaga, dengan menunjukkan bahwa dana yang diterima seringkali jauh lebih sedikit dari yang dianggarkan dalam proposal.

Dalam konteks teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Marks (2014), situasi ini dapat dikaitkan dengan faktor *pressure* (tekanan). Keterbatasan dana yang cair dari lembaga menciptakan tekanan finansial yang besar bagi ormawa, yang merasa terdorong untuk mencari cara agar kegiatan tetap berjalan meskipun dengan dana yang terbatas. Tekanan ini dapat memicu terjadinya kecurangan, seperti memanipulasi anggaran atau dokumen-dokumen untuk memenuhi kebutuhan kegiatan. Dengan demikian, pernyataan dan detail tersebut mencerminkan bagaimana tekanan finansial menjadi salah satu faktor pendorong dalam terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana kegiatan ormawa.

Menurut narasumber lain, tekanan melakukan kecurangan disebabkan karena faktor lingkungan. Sekretaris mengatakan, seorang mahasiswa melakukan kecurangan dalam lingkungan ormawa disebabkan saran-saran dan arahan dari seniornya, seperti yang terlihat dalam pengakuan berikut,

“Betul mbak, ee biasanya itu kita melakukannya itu atas dasar kemauan dan anjuran dari senior-senior....Kalau dari saya sendiri itu kebanyakan saya sendiri itu sebelum mengajukan proposal itu mbak pasti tanya ke senior-seniornya itu kebanyakan mereka menganjurkan untuk memanipulasi ee anggaran yang akan diajukan ke lembaga ataupun menambahkan barang sebetulnya itu sudah ada atau tidak begitu penting untuk dibutuhkan begitu mbak.” (Sekretaris Ormawa X)

Pernyataan dari Sekretaris Ormawa X menyoroti tekanan yang dialami oleh anggota ormawa untuk melakukan kecurangan, yang disebabkan oleh faktor lingkungan, terutama pengaruh dan arahan dari senior-senior di dalam organisasi. Mereka mengungkapkan bahwa seringkali kecurangan dilakukan atas dasar dorongan dan anjuran dari senior-senior yang memiliki pengalaman lebih dalam organisasi. Perintah atau saran yang diberikan oleh senior-senior, seperti memanipulasi anggaran atau menambahkan barang yang sebenarnya tidak diperlukan, menciptakan tekanan yang kuat bagi anggota ormawa untuk mengikuti praktik-praktik tersebut.

Dalam teori *fraud pentagon*, faktor *pressure* (tekanan) tercermin dalam situasi di mana anggota organisasi merasa terdorong untuk melakukan kecurangan karena desakan atau pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk senior-senior mereka. Tekanan untuk mengikuti arahan senior dan memenuhi harapan organisasi dapat memicu perilaku tidak etis, seperti melakukan manipulasi anggaran atau dokumen, demi mempertahankan posisi atau reputasi di dalam organisasi. Dengan demikian, pernyataan Sekretaris Ormawa X menunjukkan bagaimana tekanan dari lingkungan organisasi, khususnya pengaruh dari senior-senior, dapat menjadi faktor pendorong dalam terjadinya kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor *pressure* memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana dan kegiatan ormawa.

5. Rasionalisasi

Dalam publikasi *white paper* berjudul "*Playing Offense in a High-Risk Environment*" Marks menyatakan bahwa faktor terakhir dalam *Fraud Pentagon*

adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah tindakan membenarkan praktik kecurangan yang sedang atau sudah terjadi.

Pada kenyataannya para informan tidak membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan, mereka sadar bahwa kecurangan yang dilakukan adalah hal yang salah dan tidak seharusnya dilakukan namun karena tuntutan kebutuhan organisasi tindakan tersebut menjadi hal yang wajar yang harus dilakukan. Seperti pengakuan Sekretaris berikut,

“sebenarnya semua tindakan kecurangan yang dilakukan itu tidak wajar tetapi semua itu pasti ada sebab dan akibatnya kenapa seorang mahasiswa melakukan hal tersebut gitu, salah satu contohnya itu dana yang di anggarkan dengan dana yang cair pasti tidak sesuai dengan proposal gitu pasti itu mbak. Dalam kasus ini kayaknya wajar wajar aja mbak, kalau kita melakukan kecurangan tersebut dan itu bukan rahasia mahasiswa sebenarnya kalau ikut ormawa, pasti semua ormawa pernah melakukan hal tersebut...” (Sekretaris Ormawa X).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bendahara sebagai berikut,

“Ya kalau menurut saya sendiri wajar aja organisasi melakukan itu karena kembali lagi ketika kita mengajukan anggaran yang kita buat itu pun tidak keluar tidak sesuai dengan nominal yang kita harapkan . Pada kenyataannya bisa dikatakan jauh lah dari apa yang kita anggarkan” (Bendahara Ormawa X).

Pernyataan dari kedua informan tersebut menggambarkan pemahaman kompleks tentang tindakan kecurangan yang dilakukan dalam konteks organisasi. Sekretaris menyatakan bahwa meskipun tindakan kecurangan tidak wajar, ada sebab dan akibat yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Salah satu contoh yang disebutkan adalah ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dengan dana yang benar-benar cair, sehingga untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan kecurangan adalah hal yang wajar dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya proses rasionalisasi di mana anggota ormawa mencoba untuk meyakinkan diri bahwa tindakan kecurangan yang mereka lakukan sebenarnya dapat diterima atau dimaklumi dalam konteks situasi yang mereka hadapi.

Dalam konteks teori *fraud pentagon*, faktor rasionalisasi sangat relevan. Rasionalisasi terjadi ketika pelaku kecurangan meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan mereka sebenarnya masuk akal atau dapat diterima dalam situasi tertentu. Dalam pernyataan para informan, terlihat bahwa informan mencoba untuk merasionalisasi tindakan kecurangan dengan mengaitkannya dengan ketidaksesuaian antara dana yang dianggarkan dan dana yang cair, serta dengan anggapan bahwa semua ormawa melakukan hal serupa sehingga kecurangan telah menjadi hal yang biasa di lingkup Ormawa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sunaryo, 2020) mengatakan bahwa sikap rasionalisme dapat dilihat dari kecurangan yang telah dilakukan menjadi kebiasaan yang menjadi tradisi. Kebiasaan untuk melakukan *fraud* pada ormawa dengan pernyataan “ semua ormawa pernah melakukan” serupa dengan rasionalisasi yang diungkapkan dalam penelitian (Sunaryo, 2020). Hal tersebut berarti pernyataan bahwa “semua ormawa pernah melakukan (*fraud*)”

merupakan pernyataan rasionalisasi dan tindakan fraud yang menyebabkan pengurus ormawa saat ini tidak merasa takut dan bersalah karena hal ini telah menjadi hal yang lumrah untuk dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kecurangan tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti sikap arogansi dimana para informan merasa bahwa sanksi tidak akan menimpa mereka selama tindakan yang dilakukan tidak diketahui. Kedua adalah kompetensi informan yang dengan mudahnya melakukan kecurangan yang telah menjadi kebiasaan. Ketiga, karena adanya kesempatan seperti lemahnya pengendalian internal dari Lembaga Kemahasiswaan. Keempat, disebabkan oleh tekanan yang diterima seperti dana kegiatan yang cair tidak sesuai dengan yang dianggarkan dan tuntutan persyaratan administrasi. Kelima, rasa rasionalisme dari para informan bahwa tindakan yang mereka lakukan demi kelancaran kegiatan. Jenis kecurangan yang paling sering dilakukan adalah meliputi pemalsuan bukti transaksi, pemalsuan bukti fisik barang kegiatan serta permainan harga barang pada anggaran.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas topik yang sensitif dimana terdapat informasi yang bersifat rahasia organisasi sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih detail dan perlu disamarkan. Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian di beberapa ormawa di beberapa perguruan tinggi, karena setiap ormawa di perguruan tinggi memiliki kebijakan yang berbeda, serta menambah informan di level yang lebih tinggi seperti Pihak Lembaga Kemahasiswaan guna mendapatkan informasi dari sisi yang berbeda terkait praktik kecurangan yang dilakukan ormawa.

DAFTAR RUJUKAN

- Association Of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). 'Survei Fraud Indonesia'. *Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1-76. <https://AcfeIndonesia.or.Id/Survei-Fraud-Indonesia/>
- Cahyaningtyas, R. I., & Achsin, M. (2018). 'Studi Fenomenologi Kecurangan Mahasiswa Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Mahasiswa: Sebuah Realita Dan Pengakuan'. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Free, C. (2015). 'Looking Through The Fraud Triangle: A Review And Call For New Directions'. *Meditari Accountancy Research*, 23(2), 175-196. <https://doi.org/10.1108/Medar-02-2015-0009>
- Gumelar, T. M., dkk. (2020). 'Pencegahan Fraud Pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif Theory Of Planned Behavior'. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 12(1), 176-200. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/23963>
- Hidayati, L. W. (2018). 'Abu-Abu Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa: Kecurangan Dalam Laporan Pertanggungjawaban. Universitas Negeri Malang'.

- Ismatullah, I. (2016). 'Analisa Pengaruh Teori *Gone Fraud* Terhadap *Academic*'. 1(2008), 134-142.
- Kingston, K. G. (2011). 'The Dynamics Of Gang Criminality And Corruption In Nigeria Universities: A Time Series Analysis'. *Afr. J. Law Criminol*, 1(1), 58- 68.
- Marks, J. T. (2014). 'Playing Offense In A High-Risk Environment'. *Crowe Horwath*, 94 (8), 14. *Osearch. Ebscohost. Com. Wam. City. Ac. Uk/Login. Aspx*.
- Moleong, L. J. (2018). 'Metodologi Penelitian Kualitatif / Penulis, Prof. Dr. Lexy J. Moleong', M.A. Pt Remaja Rosdakarya.
- Ogunode, N. J., & Ohunene, L. A. (2022). 'Central Asian Journal Of Social Sciences And History A Review Of Factors Responsible For High Rate Of Financial Corruption In Public Universities In Nigeria. *Central Asian Journal Of Social Sciences And History*', 2022(7), 2660-6836.
- Puspita, Y. R., dkk. (2015). 'Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa'. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 133- 144. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011>
- Sugiyono, P. (2011). 'Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D'. Alfabeta, Bandung, 62-70.
- Sunaryo, S., & Utami, H. (2021). 'Kecurangan Pelaporan Keuangan Organisasi Kemahasiswaan: Perspektif *Crowe's Fraud Pentagon Theory*'. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 8(1), 51-64. <https://doi.org/10.17977/um004v8i12021p051>
- Salsabil, S.M, dkk. (2019). 'Fraud and Whistleblowing : Tinjauan Pengelolaan Dana Organisasi Kemahasiswaan'. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 64-76.
- Tuanakotta, T. M. (2007). 'Akuntansi Forensik & Audit Investigatif'. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.